

# “ Kalau Rawls sudah punya veil of ignorance, apa yang Islam tambahkan pada cakrawala keadilan — atau hanya mengulang?

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

Pekan ini di kelompok Toleransi & Lintas-Iman terjadi lonjakan 70,1% post dari pekan sebelumnya, dengan tema dominan yang sama mengulang: Pancasila & integritas bangsa, kritik tentang korupsi pasca-haji, debat tentang zuhud versus kekayaan. Semua bermuara pada satu pertanyaan etis yang sebenarnya kuno: bagaimana mendefinisikan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat majemuk? Untuk mahasiswa Muslim yang aktif di kampus sekuler, pertanyaan ini sering muncul di

kelas filsafat politik — ketika dibahas John Rawls dengan *A Theory of Justice* (1971), Amartya Sen dengan *capabilities approach*, atau Michael Sandel dengan kritik terhadap liberalisme. Pelajar Muslim yang punya literasi pesantren atau kajian akhir pekan kadang merasa jarak: apakah teologi politik Islam sungguh punya kontribusi pada diskursus global, atau hanya menjadi suara pinggiran yang dikutip basa-basi?

Argumen yang dibangun di sini adalah: konsep keadilan dalam tradisi Islam — yang diabadikan dalam istilah *'adl* dan *qist* — bukan sekadar VARIAN dari teori keadilan kontemporer. Ia menambahkan empat lensa yang sering luput dari Rawls dan Sen.

Lensa pertama, dari sisi epistemologis. Rawls membangun teorinya pada *veil of ignorance* — sebuah eksperimen pikiran di mana perancang prinsip keadilan tidak mengetahui posisi sosial mereka sendiri. Pendekatan ini cerdas tetapi sangat *procedural*: ia menjamin keadilan formal tanpa memberi panduan substantif tentang apa yang adil. Tradisi Islam menempuh jalur berbeda. *'Adl* dan *qist* diberi BENTUK SUBSTANTIF lewat wahyu — QS. An-Nahl: 90 memerintahkan *'adl* dan *ihsān* (berbuat lebih dari sekadar adil); QS. Hud: 85 memerintahkan tidak mengurangi takaran (*mizan*). Implikasinya: keadilan dalam Islam tidak hanya tentang "prosedur yang setara untuk semua", tetapi juga tentang SUBSTANSI yang spesifik. Celah lensa ini: ia mengandalkan otoritas teks. Pertanyaannya untuk pembaca non-Muslim: apakah substansi etis tanpa landasan teks bisa stabil di tekanan politik kontemporer?

Lensa kedua, dari sisi ranah keberlakuan. Imam ar-Raghib al-Asfahani dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* membedakan *'adl* (keadilan kualitatif yang dirasakan) dari *qist* (keadilan kuantitatif yang dihitung). Kedua kata ini melengkapi: *'adl* mengatur ranah relasional (balas budi, perlakuan dalam keluarga), *qist* mengatur ranah transaksional (takaran,

warisan, pembagian harta umat). Hadits Sahih Muslim 4721 menyebut tiga ranah yang dituntut adil dari pemimpin: hukum, keluarga, dan amanah. Rawls dan Sen, sebaliknya, fokus pada keadilan institusional dan abai pada keadilan rumah tangga. Untuk konteks Indonesia di mana banyak ketidakadilan terjadi di domain privat (KDRT, pewarisan yang timpang, ketimpangan pendidikan antara anak laki-laki dan perempuan), kerangka Islam menawarkan lensa yang Rawls dan Sen lewatkan. Celah lensa ini: ranah privat sering dilindungi sebagai "urusan keluarga" — sehingga prinsip-prinsip ini sulit ditegakkan tanpa intervensi yang justru melanggar privasi. Pertanyaan: bagaimana mengoperasionalkan keadilan privat tanpa membuat negara terlalu masuk?

Lensa ketiga, dari sisi eskatologis. Konsep mizan di Hari Kiamat (QS. Al-Anbiyaa: 47) menjadi jangkar psikologis yang kuat untuk konsistensi etis ketika keadilan dunia gagal. Rawls dan Sen tidak mengakui dimensi ini karena tradisi filsafat politik sekuler menolak meletakkan dasar etis pada keyakinan metafisik. Implikasinya: ketika tekanan publik melemah, ketika institusi gagal, ketika hukum tidak menjangkau — orang yang punya jangkar eskatologis tetap konsisten karena dia tahu mizan akan datang. Yang tidak punya, sering mundur ke kompromi. Celah lensa ini: ia tidak meyakinkan pemeluk tradisi sekuler. Pertanyaan: apa fondasi etis stabil untuk pluralisme Indonesia kalau jangkar eskatologis tidak dimiliki sebagian penduduk?

Lensa keempat, dari sisi metode jalan tengah. Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menulis bahwa *al-'adl* adalah jalan tengah antara dua ekstrem — antara kekikiran dan pemborosan, antara kekejaman dan kelemahan. Rawls' difference principle adalah satu formulasi jalan tengah, tetapi terlalu spesifik (hanya berlaku pada ketimpangan ekonomi). Konsep Islam tentang keadilan-sebagai-jalan-tengah lebih kapasitasif: ia bisa diaplikasikan ke ranah sopan-santun, emosi, ekspresi politik, distribusi sumber daya, dan bahkan cara berbicara di depan publik. Celah lensa ini: "jalan tengah" yang terlalu fleksibel berisiko jatuh ke relativisme — yang bisa membenarkan kompromi etis untuk apapun.

Pertanyaan: bagaimana membedakan jalan tengah yang konsisten dari kompromi yang nyaman?

Solusi praktis untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan literasi keadilan lintas-tradisi ada beberapa lapis. Di level pribadi: jangan terburu-buru memilih satu kerangka sebagai satu-satunya yang benar. Yang produktif adalah memegang DUA kerangka bersamaan — gunakan Rawls/Sen untuk diskusi institusional dan kampus, gunakan kerangka 'adl/qist untuk diskusi privat dan komunal. Belajar berpindah-rangka adalah kompetensi penting bagi generasi yang akan masuk ke arena publik majemuk. Di level kelompok kajian: alih-alih mempelajari "filsafat politik Islam" secara terisolasi, bandingkan setiap konsep dengan padanan kontemporer. Misalnya: ketika membaca tafsir QS. An-Nahl 90 yang memerintahkan 'adl dan *iḥsān*, segera bandingkan dengan diskusi Sen tentang capabilities — di mana titik temunya, di mana titik berseberangannya. Ini melatih pikiran melihat lebih dari satu lensa. Di level riset / tugas akhir: kalau kamu sedang mencari topik skripsi, pertimbangkan tema-tema komparatif yang masih kurang diteliti — bagaimana *qist* mengkritik kebijakan UMR kontemporer, bagaimana hadits tentang 'adl di keluarga dapat menginformasikan diskursus gender Indonesia, bagaimana mizan di Hari Kiamat dapat dianalisis sebagai mekanisme deterrence yang lebih kuat dari sanksi hukum positif. Topik-topik ini punya nilai akademis sekaligus relevansi praktis untuk konteks Indonesia. Di level diskusi publik: kalau kamu aktif di organisasi mahasiswa atau platform debat, ajukan kerangka 'adl/qist sebagai LENSE TAMBAHAN, bukan pengganti Rawls. Strategi ini menjaga kamu tetap kredibel di ruang akademik sekuler sambil membawa kontribusi tradisi.

Penutup. Pertanyaan poster — "apa yang Islam tambahkan pada cakrawala keadilan, atau hanya mengulang?" — sengaja dibiarkan terbuka. Jawaban "mengulang" tidak fair pada empat dimensi yang baru dipetakan; jawaban "menambahkan lengkap" terlalu cepat karena tradisi Islam sendiri masih dalam proses dialog internal tentang aplikasi 'adl/qist di konteks modern. Yang penting bukan menjawab pertanyaan

ini secara final, melainkan memahami bahwa diskursus keadilan global adalah RUANG TERBUKA — dan setiap tradisi yang ikut serius berkontribusi padanya. Generasi yang masuk ke arena publik dua dekade ke depan akan diuji bukan oleh seberapa hebat mereka menghafal Rawls atau ar-Raghib, melainkan oleh kemampuan mereka memegang DUA atau lebih kerangka sekaligus, dan tahu kapan masing-masing paling relevan.

# | Pertanyaan

Q · 01

**Bukankah membandingkan Islam dengan Rawls dan Sen justru merendahkan posisi Islam — seakan-akan Islam perlu divalidasi oleh filsafat sekuler?**

A

Pushback ini valid kalau perbandingan dilakukan sebagai "ujian" Islam oleh ukuran luar. Tetapi yang dimaksud di sini bukan validasi, melainkan DIALOG. Tradisi Islam — dari al-Kindi hingga Ibn Rusyd hingga al-Ghazali — punya sejarah panjang berdialog dengan filsafat Yunani dan tradisi lain. Mereka tidak merendahkan Islam dengan dialog itu; sebaliknya, mereka memperkaya tradisi dengan menjawab tantangan dari luar. Yang merendahkan justru ISOLASIONISME — yang mengisyaratkan tradisi terlalu rapuh untuk menghadapi diskusi terbuka.

Q · 02

**Kalau 'adl/qist sudah jelas dalam teks, kenapa harus repot-repot dengan filsafat sekuler? Bukannya cukup pelajari fiqh saja?**

A

Fiqh adalah aplikasi 'adl/qist pada situasi-situasi spesifik. Tetapi situasi modern (kontrak digital, perdagangan global, AI yang menentukan keputusan, ketimpangan struktural global) sering lebih kompleks daripada situasi yang sudah dibahas fiqh klasik. Untuk mendekatinya, dibutuhkan KOSAKATA TAMBAHAN — yang sebagian datang dari filsafat politik modern. Bukan menggantikan fiqh, tetapi memperluasnya. Pelajar yang hanya menguasai fiqh klasik tanpa kosakata modern akan kesulitan mengaplikasikan 'adl/qist ke fenomena kontemporer.

Q · 03

**Bukankah konsep mizan di Hari Kiamat justru bisa disalahgunakan — orang merasa cukup berbuat sebagian baik karena akhirnya akan dihitung di akhirat?**

A

Pushback ini sangat valid secara empirik — banyak praktek menyalahgunakan konsep mizan untuk menunda tanggung jawab dunia. Tetapi salah-guna sebuah konsep tidak meniadakan kekuatan konsep itu sendiri. Yang harus dilakukan: AJARKAN mizan secara benar — sebagai jangkar yang MEMPERKUAT konsistensi etis dunia, BUKAN sebagai pelarian. Hadits Nabi ﷺ tentang "shalat adalah tiang agama, tetapi shalat yang tidak mencegah maksiat hanya menjauhkan dari Allah" persis menjawab kekhawatiran ini: ritualisme tanpa transformasi etis adalah self-defeating.

Q · 04

**Saya teman saya non-Muslim yang aktif diskusi keadilan — apakah saya boleh membagikan kerangka 'adl/qist sambil tidak mengajak dia masuk Islam?**

A

Boleh dan justru BAIK. Tradisi Islam tidak mensyaratkan konversi sebagai prasyarat berbagi insight. Konsep 'adl/qist punya pemikiran yang bisa diapresiasi dengan kerangka rasional sekuler, mirip dengan bagaimana kita mengapresiasi konsep Kant tentang imperatif kategoris tanpa harus jadi Kantian. Yang penting: hadirkan dengan rendah hati sebagai KONTRIBUSI tradisi, bukan sebagai klaim eksklusif. Banyak kontribusi penting Islam pada filsafat sains dan etika global terjadi lewat dialog model ini.

**Bukankah ini elitisme kampus? Mahasiswa pesantren biasa atau santri kampus daerah tidak punya akses ke Rawls atau Sen. Bagaimana mereka bisa ikut diskusi ini?**

**A**

Pushback ini valid dan harus dijawab serius. Diskursus akademik tentang 'adl/qist memang sering dimonopoli oleh mahasiswa kampus elit di kota besar — itu masalah struktural pendidikan tinggi Indonesia yang lebih dalam. Yang bisa dilakukan: (1) terjemahkan ide-ide ini ke bahasa sederhana yang tidak butuh nama-nama Rawls/Sen, (2) bangun kelompok diskusi lintas-kampus yang melibatkan santri dari pesantren dan mahasiswa kampus sekuler, (3) gunakan ulama Indonesia (Buya Hamka, KH Hasyim Asy'ari) sebagai jembatan, karena mereka sendiri menulis tentang keadilan dengan kosakata yang akarnya pesantren tetapi tetap memadai untuk diskusi modern. Demokrasi epistemik tradisi Islam Indonesia adalah salah satu kekuatannya — pertahankan dengan inklusif.